

**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
SEKRETARIAT DAERAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 untuk tahun pelaksanaan 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik untuk perbaikan pada waktu mendatang.

Ba'a, 28 Januari 2020  
Kepala Bagian Adm. LPBJ  
Setda Kabupaten Rote Ndao,



**Ferdinan Ndun, ST**  
Nip. 19811210 200904 1 001

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dari Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai tolak ukur dan hasil kerja pada Organisasi Perangkat Daerah ini. Dengan landasan pemikiran tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dirinci semua Program dan Kegiatan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran sehingga dapat terukur secara komprehensif akan capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen dan tekad Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019, sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dijelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang juga dijelaskan secara rinci agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

S A S A R A N	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
Terpenuhinya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	99,27	Sangat Berhasil

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana;
2. Kurangnya aparatur yang kompeten;
3. Kurangnya Kataatan Perangkat Daerah untuk menginput rencana anggaran belanja pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

Terhadap kendala-kendalah permasalahan yang dihadapi akan diupayakan perbaikan ke depannya untuk pencapaian sasaran kinerja.

Ba'a, 28 Januari 2020  
Kepala Bagian Adm. LPBJ  
Setda Kabupaten Rote Ndao,



**Ferdinan Ndun, ST**

Nip. 19811210 200904 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Iktisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	3
D. Dasar Hukum .....	8
E. Sistematika Laporan .....	8
Bab II Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja .....	11
A. Rencana Strategis Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao .....	11
Tahun 2014 – 2019 .....	
1. Pernyataan Visi dan Misi .....	12
2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan .....	13
B. Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	17
A. Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	21
Bab IV P e n u t u p .....	22





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan adalah terselenggaranya *good governance*. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (***result oriented government***). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari **pola pikir** berapa besar **dana** yang telah dan akan dihabiskan **menjadi** berapa besar **kinerja** yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertamanya akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ***Output*** merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang ***outcome*** adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga **memberi manfaat bagi masyarakat**.

Untuk itu, maka Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao.



Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao pada masa mendatang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **➤ Maksud**

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao adalah untuk :

1. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2019 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang di capai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
3. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **➤ Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019 berpatokan pada 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2019.





**2 Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja

Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

**3 Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### C. GAMBARAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### 2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi

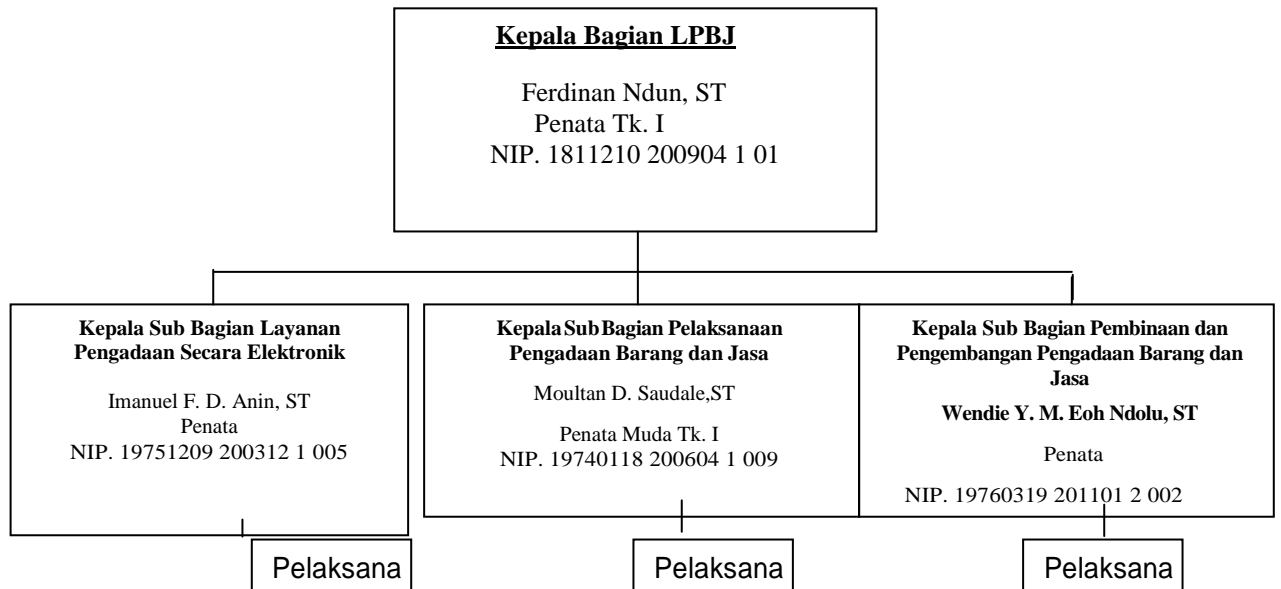
Susunan Organisasi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

- a. Struktur Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :
  1. Kepala Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao (terisi)
  2. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( terisi )
  3. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ( terisi )
  4. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa ( terisi )
  5. Pelaksana sejumlah 5 orang



Struktur Organisasi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao terlihat pada tabel berikut:

### Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Bagan Struktur Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (*Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018*)

#### b. Sumber Daya Manusia

Adapun Jumlah Kekuatan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao keadaan Pegawai Negeri Sipil saat ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dengan perincian berdasarkan struktur dan tingkat pendidikan sebagai berikut :



Tabel Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao

No	Pangkat	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	I/a	Juru Muda	0	0	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	0
3	I/c	Juru	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	0	0	0
Jumlah Golongan II			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	II/a	Pengatur Muda	0	0	0
7	II/b	Pengatur Muda Tk.I	0	0	0
8	II/c	Pengatur	0	1	1
9	II/d	Pengatur Tk.I	0	0	0
Jumlah Golongan III			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
10	III/a	Penata Muda	2	1	1
11	III/b	Penata Muda Tk.I	3	0	0
12	III/c	Penata	1	1	1
13	III/d	Penata Tk.I	1	0	0
Jumlah Golongan IV			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	IV/a	Pembina	0	0	0
15	IV/b	Pembina Tk.I	0	0	0
16	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0
17	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0
Total			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah pegawai 9 orang, golongan III berjumlah 9 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	S1	8 Orang	6 Orang	2 Orang
2	D3	1 orang	1 orang	

Sumber Data Tahun 2019 (Data per Desember)

Susunan kepegawaian pada Bagian Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Daftar Nama PNS Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Rote Ndao (Data Per Desember 2019)**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ferdinan Ndun, ST 19811210 200904 1 001	Kepala Bagian III/d	S1
2	Immanuel F. D. Anin, ST 19751209 200312 1 005	Kasubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik III/c	S1
3	Wendie Y.M.Eoh Ndolu, ST 19760319 201101 2 002	Kasubag Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa III/c	S1
4	Moultan D. Saudale, ST 19740118 200604 1 009	Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa III/b	S1
5	Roberto S. Dumanauw, ST 19780908 200701 1 019	Pelaksana III/b	S1
6	Yopendas Lido, SH 19801101 200604 1 022	Pelaksana III/b	S1
7	Herlinda Lenggu,S,ST NIP.19820312 200604 2 015	Pelaksana III/a	S1
8	Jasiel G. Thelik, SE 19710613 200604 1 018	Pelaksana III/a	S1
9	Ronald J. Dethan, A.Md 19820131 200904 1 007	Pelaksana III/a	D3



#### **D. Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. Sistematika Laporan**

LKIP Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata

Pengantar

Ikhtisar

Eksekutif

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

##### **A. Latar Belakang**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

##### **B. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.



C. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan – peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

E. Sistematika Laporan

## **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis (RenstraTahun 2014-2019)

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

a. Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa setda Kabupaten Rote Ndao beserta kandungan maknanya.

2. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao.

b. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan



menguraikan seluruh tujuan per masing-masing misi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa setda Kabupaten Rote Ndao.

2. Sasaran

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing – masing tujuan yang hendak dicapai Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao.

3. Strategi

Menguraikan Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

4. Kebijakan

Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing – masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2019

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2019.

B. Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2019 beserta rincian belanja per kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP





## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

*P*erencanaan Strategis Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 -2019 yg merupakan Perencanaan Strategis Bagian Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun system akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepengemrintahan yang baik ( Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

#### **A. RENCANA STRATEGI BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. ROTE NDAO TAHUN 2014-2019**

RENSTRA Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.



## 1. Pernyataan Visi dan Misi

### a. Visi

Berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014–2019, yaitu: “Terwujudnya Kehidupan masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT (BERTumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT) bertumpu pada pengembangan pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”, dengan melandaskan pada Misi keenam yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”, maka ditetapkan Visi Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA yang kemudian menjadi Visi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Rote Ndao, yaitu:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap Pelayanan Administrasi Publik di Bidang Administrasi Perekonomian, Pembangunan Daerah dan Sumber Daya Alam.”

### b. Misi

Penetapan Visi diatas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019, yang berfokus pada misi keenam yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima** sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui peningkatan



kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao menjalankan misi koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui :

1. Meningkatkan kualitas administrasi dan pengembangan pembangunan melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dan pengkoordinasian serta pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang potensial dalam mengelola administrasi pembangunan melalui pembinaan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan citra aparatur yang bersih, professional serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.
4. Mewujudkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien

**c. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, strategi diuraikan dalam beberapa arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. maka Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan strategi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin baik secara horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama.
3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

**d. Kebijakan**

Memantapkan sistem kepegawaian dan sistem pengawasan dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab dan disiplin dengan pola karir yang mengacu pada prestasi kerja dan kemampuan professional, peningkatan pelayanan dan pematapan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.



Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut di atas maka dirumuskan Program dan Kegiatan Strategis sebagai berikut ;

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan dari program ini adalah sbb :

- Penyediaan jasa administrasi keuangan;

2. PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

kegiatan dari program ini adalah sbb :

- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

3. PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

kegiatan dari program ini adalah sbb :

- Penunjang Operasioanal Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)



## **B. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN**

### **PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. ROTE NDAO TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Tahunan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao ini merupakan alat ukur yang bermanfaat untuk mengecek apakah Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.

Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah pada akhir tahun 2019 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD Tahun 2019, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2018 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019 adalah dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja**

SASARAN		INDIKATOR		TARGET
1		2		3
1	Terpenuhinya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1.1	- Prosentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100%
		1.2	- Prosentase Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan	100%



### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ROTE NDAO**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Acuan untuk menilai kinerja Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra (2014-2019), RKT 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.



Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

### CAPAIAN KINERJA

#### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$





Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$  : Berhasil
- $55\% < X < 70\%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$  : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 maka dapat di jelaskan sebagai berikut :

<b>SASARAN 1</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>
------------------	--

Sasaran ini diarahkan dalam rangka terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Program yang mendukung sasaran ini adalah

1. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah melalui kegiatan :
  - a. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan anggaran sebesar Rp. 180.601.100,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah*), terealisasi 174.795.017,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Belas Rupiah*) atau sebesar 96,79 %.



2. Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah melalui kegiatan:

- a. Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dengan anggaran sebesar Rp. 107.037.500,- (*Seratus Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), terealisasi Rp. 97.985.500,- (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau sebesar 91,54%.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Prosentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	-	100	99,43	99,43	-
2.	Prosentase Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan	%	-	100	99,18	99,18	
				<b>Rata-Rata</b>	<b>99,27</b>		

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rote Ndao di tahun 2019 ditargetkan 100% terhadap fasilitasi pengadaan secara elektronik (e-Procurement) yaitu sebanyak 122 paket yang di tenderkan dan 52 paket e-purchasing semuanya difasilitasi dan berhasil ditenderkan 121 paket dan 52 e-purchasing sedangkan 1 paket gagal tender di sebabkan faktor teknis. Dengan demikian indikator Pengelolaan LPSE teralisasi 99,43%. Dengan capaian indikator kinerja 99,43%.



2. Penujang Operasional ULP Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahun 2019 ditargetkan 100% terhadap fasilitasi pengadaan barang/jasa (e-Procurement) yaitu sebanyak 122 paket yang di tenderkan semuanya difasilitasi dan berhasil ditenderkan 121 paket dan sedangkan 1 paket gagal tender di sebabkan faktor teknis. Dengan demikian indikator Pengelolaan LPSE teralisasi 99,18%. Dengan capaian indikator kinerja 99,18%.
3. Rata rata capaian sasaran adalah sebesar 90,27 %

## B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kinerja keuangan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD dengan rinciannya dapat dii gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Penghasilan )</b>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	301.246.600,-	286.383.517,-	<b>95,06 %</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.608.000,-	13.608.000,-	100 %
2.	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	180.601.100,-	174.795.017,-	96,79 %
3.	Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	107.037.500,-	97.985.500,-	91,54 %



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan kepada Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Pemecahannya adalah dengan meningkatkan jumlah sumberdaya aparatur baik kualitas maupun kuantitas dan menambah jumlah anggaran agar proses pelaksanaan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahunnya

Baa, 28 Januari 2020  
Kepala Bagian Adm. LPBJ  
Setda Kab Rote Ndao,



**Ferdinan Ndun, ST**  
Penata Tk.I  
Nip19811210 200904 1 001